

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada masa kemerdekaan hingga orde baru, Indonesia pernah menerapkan sistem sentralisasi pada pola pemerintahannya. Sentralisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat. Pada pola pemerintahan ini, keputusan dan kebijakan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun semenjak tergulingnya orde baru, pola pemerintahan di Indonesia berubah menjadi desentralisasi. Hal ini terbukti dengan munculnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini sudah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Salah satu jenis desentralisasi yang dilaksanakan yaitu desentralisasi fiskal. Semenjak diberlakukannya desentralisasi fiskal ini, alokasi transfer ke daerah yang masuk ke APBD meningkat, sehingga semakin diperlukan penekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Transparansi dan akuntabilitas sangatlah diperlukan untuk menghindari adanya tindak manipulasi ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori Agensi, pemerintah daerah merupakan *agent* karena menyelenggarakan tanggungjawab pemerintahan sesuai dengan segala kepentingan masyarakat selaku *principal* (Wau dan Ratmono, 2015). Disadari sebagai suatu hal yang penting, maka transparansi dan

akuntabilitas kepada publik ini diatur dalam sebuah regulasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut UU tersebut, informasi publik yang wajib diumumkan oleh badan publik diantaranya yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, dan informasi lainnya.

Pemerintah daerah sebagai salah satu badan publik wajib untuk menyampaikan informasi publik, termasuk laporan keuangan daerah. Menurut Mahsun, dkk (2013), laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik (laporan keuangan pemerintah daerah) harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh setiap pengguna. Selain itu, informasi publik juga harus dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

Pemerintah daerah harus dapat menyebarluaskan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pengguna dan pengguna harus dapat mengakses laporan keuangan dengan cepat, biaya yang ringan dan cara yang sederhana. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang tepat dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Menurut Styles dan Tennyson (2007), salah satu cara yang paling nyaman dan menghemat biaya bagi instansi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi adalah internet. Salah satu bentuk

pemanfaatan internet oleh pemerintah daerah yakni adanya *website* setiap pemerintah daerah di Indonesia. Dalam *website* tersebut, pemerintah daerah juga dapat menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan. Penyampaian *internet financial reporting* (IFR) merupakan cara yang mudah dan menghemat biaya bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan. Menurut Ritonga dan Syamsul (2016), rata-rata tingkat transparansi pengelolaan daerah berbasis *website* masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%. Hal ini berarti penggunaan *website* pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan masih belum optimal. Keberagaman ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* juga ditemukan dalam setiap *website* pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai standar pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah merupakan tingkat ketersediaan dokumen-dokumen laporan keuangan secara *online* di *website* pemerintah daerah, sedangkan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah adalah tingkat kemudahan pengguna dapat menemukan dan melihat laporan keuangan di *website* pemerintah daerah (Styles dan Tennyson, 2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* diantaranya yaitu *leverage*, opini audit, dan kemandirian finansial pemerintah daerah. Menurut Halim (2007), *leverage* adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang diberikan oleh pemilik (modal) dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur (hutang). Hanifah,

dkk (2017) berpendapat bahwa semakin tinggi nilai *leverage* pemerintah daerah, maka semakin rendah ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah pada *website* resmi pemerintah daerah. Opini audit merupakan pernyataan pendapat tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Rusmana dkk, 2017). Menurut Styles and Tennyson (2007), pemerintah daerah yang mendapat penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan yang baik, cenderung untuk menyajikan laporan keuangannya di internet. Kemandirian finansial pemerintah daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Christiaens (1999) berpendapat bahwa kekayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah berhubungan positif dengan pengungkapan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diani (2016), Rosita dan Arifin (2017), serta Hanifah, dkk (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012), yaitu rasio pembiayaan hutang tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah (IKD) pada situs resmi pemda, namun berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2011) dan Ratmono (2013) juga menunjukkan bahwa hutang pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wau dan Ratmono (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan IFR, namun tidak berpengaruh pada keteraksesan IFR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) yang menunjukkan bahwa opini BPK berpengaruh negatif terhadap ketersediaan *internet financial reporting* pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) menyatakan bahwa rasio kemandirian pemda berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada situs resmi pemda, namun tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas IKD pada situs resmi pemda. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Ratmono (2013) dan Wau dan Ratmono (2015) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketersediaan *internet financial reporting*, namun berpengaruh positif terhadap keteraksesan *internet financial reporting*.

Ketidakkonsistensian yang ada pada hasil penelitian terdahulu serta masih sedikitnya penelitian yang menganalisis mengenai ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah, maka memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Leverage*, Opini Audit, dan Kemandirian Finansial Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah Tahun 2014 – 2016".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
5. Apakah terdapat pengaruh kemandirian finansial pemerintah daerah terhadap ketersediaan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?
6. Apakah terdapat pengaruh kemandirian finansial pemerintah daerah terhadap keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh antara *leverage*, opini audit, dan kemandirian finansial pemerintah daerah

terhadap ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.

2. Membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menunjukkan kekonsistensian dari hasil yang didapat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan beberapa kontribusi, diantaranya :

1. Kontribusi teori : memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh *leverage*, opini audit, dan kemandirian finansial pemerintah daerah terhadap ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* oleh pemerintah daerah.
2. Kontribusi praktik : mampu menjadi pertimbangan pemerintah daerah terkait ketersediaan dan keteraksesan *internet financial reporting* untuk menciptakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna.